

**Judul** : Ramai-Ramai Bilang Nggak Tahu  
**Tanggal** : Jumat, 26 Januari 2018  
**Surat Kabar** : Indo Pos  
**Halaman** : 1-7

# Ramai-Ramai Bilang Nggak Tahu

## Sejumlah Politikus Bisa Jadi Terseret Korupsi Bakamla

JAKARTA-Selain diduga mengalir ke Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar melalui Fayakun Andiardi, dana korupsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga diduga mengalir kepada beberapa politisi lain. Mereka disinyalir menerima enam persen sebagai fee dari nilai proyek Rp 400 miliar. Namun, ramai-ramai seluruhnya membantah dan mengklaim bila hal itu sebuah pencatutan nama.



Para politisi itu antara lain Anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari dan Ali Fahmi alias Fahmi

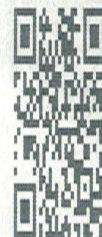
Habsyi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir,

dan Setya Novanto dari Partai Golkar. Kemudian, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Kebangkitan

## POLLINGHEADLINE

Beberapa politikus membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Badan Keamanan Laut (Bakamla)? Apakah Anda percaya begitu saja?

A. Percaya B. Tidak



Bangsa (PKB) Bertus Merlas serta Anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem Donny Imam Priambodo ■ **Baca Ramai-Ramai...7**



## Ramai-Ramai Bilang Nggak Tahu

▮ Sambungan dari halaman 1

Menanggapi adanya beberapa nama anggota DPR yang terseret, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mengajak kepada semua pihak, tidak hanya legislatif, melainkan juga kepada masyarakat untuk sama-sama memberikan pengawasan dan dukungan terhadap terlaksananya sidang tersebut. "Sehingga menjadikan hal yang terbaik dan menjadikan hal yang betul-betul faktual keadaannya seperti apa yang ada sebenarnya," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/1).

Politisi Partai Demokrat itu juga mengimbau perlunya mengedepankan asas praduga tak bersalah agar tidak menjustifikasi siapa pun yang disebut dalam kesaksian Direktur PT Melati Techno Indonesia (MTI) Fahmi Dharmawansyah di Pengadilan Tipikor, Rabu (24/1) lalu.

Eva Kusuma Sundari saat dikonfirmasi membantah menerima suap proyek Bakamla. Ia mengaku tidak pernah mengetahui rencana proyek tersebut dan tidak pernah merasa diajak rapat atau melakukan lobi-lobi menemui pihak bersangkutan dalam proyek itu. Terlebih, dirinya tidak mempunyai posisi penting di DPR dan partai.

"Saya tidak punya posisi strategis apapun di partai maupun di DPR (Banggar, Red), kecuali anggota biasa di Komisi XI (yang tidak ada kaitannya dengan Bakamla, Red)," kilahnya kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (25/1).

Disinggung dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) disebut sebagai anggota Litbang PDIP? Eva menyatakan itu tidak benar. Ini karena dirinya selama ini hanya sebagai bagian kaderisasi di partai. Eva pun menganggap munculnya namanya hanya dicatat oleh Fahmi. Karena, sebelumnya tidak mengenal Fahmi dan Anggota Komisi I Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi yang juga disebut di BAP.

"Apalagi bahas hal tersebut (pengadaan alat satelit monitoring Bakamla, Red) dimana dan kapan? Wong barangnya saja enggak tahu," bantah Eva.

Sebaliknya, Eva mengaku baru mengetahui nama Fayakhun dan Fahmi setelah pemberitaan korupsi Bakamla yang melibatkan dirinya mencuat ke publik. "Saya cukup kaget," tandasnya.

Dalam hal ini, Eva pun siap untuk mengikuti proses hukum di KPK dan memberikan kesaksian apabila diperlukan keterangan dirinya. "Saya siap diperiksa secara terbuka dan diaudit harta saya," tandasnya.

Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan pun mendukung keterangan Eva. Menurutinya, Eva tidak mungkin tersangkut korupsi Bakamla. "Dia baru masuk kembali di DPR. Posisinya juga hanya sebagai anggota biasa," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Secara pribadi, Arteria pun memandang Eva sebagai sosok yang bersih dan jujur. Jadi tidak mungkin Eva terlibat dalam kasus korupsi Bakamla. "Saya yakin, Bu Eva tidak mungkin terlibat. Dia itu aktivis demokrasi dan antikorupsi," tandasnya.

Partai Nasdem juga membantah Donny menerima suap Bakamla. Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, nama Donny hanya dicatat oleh Fahmi. "Sebagaimana yang disampaikan Eva, Donny juga merasa namanya dicatat," ujarnya kepada INDOPOS, kemarin.

Keyakinan Irma bila Donny hanya dicatat, karena NasDem bukanlah partai dengan kekuatan besar yang bisa menjadi alat tawar untuk meloloskan anggaran. "Donny hanya sebagai anggota biasa, bukan pimpinan komisi. Tidak punya cukup kekuatan untuk melakukan seperti yang dituduhkan," tegasnya.

Meski begitu, sebagai partai yang taat hukum, NasDem mempersilakan apabila KPK ingin memeriksa Donny. PKB juga mengatakan hal yang sama. Wakil Sekjen PKB Daniel Johan yakin penyebutan nama Bertus hanya penca-

tutan semata. "Kami serahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku," katanya.

Setya Novanto yang juga mantan Ketua DPR RI membantah dirinya terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan di Bakamla. Dirinya sama sekali tidak ada urusan dengan Bakamla. Mantan Ketua Umum Golkar ini pun bingung mengapa namanya selalu dikaitkan dalam setiap kasus korupsi. "Saya tidak pernah tahu urusan Bakamla, kok selalu menghubungkan nama saya, apa karena namanya Setya Novanto. Saya tidak tahu benar, jahat juga ya kadang ya. Pencemaran nama baik," ucapnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1).

Kendati dirungkan, terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP itu mengaku masih mempertimbangan apakah akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik itu ke pihak Polri atau tidak. "Masih dalam keadaan begini, cuma prihatin ajalah. Saya nyebut saja. Kita lihat perkembangannya," singkat Novanto.

Politikus Partai Golkar yang kini menjabat Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir secara tegas menolak jika namanya dikaitkan dalam kasus korupsi proyek Bakamla. Menurut dia, meskipun namanya turut disebut dalam percakapan WA di persidangan kasus itu pada Rabu (24/1) lalu, tidak berarti ada kaitan ia dalam kasus tersebut. "Bisa saja. Kalau nama disebut saja, terus masalahnya apa? Inilah republik ini. Orang ada di pengadilan ada orang disebutkan, kan yang bilang begitu bukan Fayakhun kan, tapi cuma ada chatnya, saya juga nggak tahu juga," ujar Kahar kepada wartawan.

Ia juga tidak mengetahui alasan namanya disebut dalam percakapan WA antara Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arif dengan Fayakhun Andriadi. Bisa saja namanya hanya dicatat dalam percakapan tersebut.

"Coba dilihat dulu kan ada orang yang katanya di chat masalah Fayakhun, kan tidak ada disebutkan Fayakhun sebut nama saya. Lah kalau menyebut nama saya kan nggak ada masalah uang," imbuhnya.

Dia menilai wajar namanya disebut dalam proses penganggaran, mengingat sebelumnya

ia pernah menjadi Ketua Banggar DPR sampai Februari 2017. "Dulu saya Ketua Badan Anggaran, di Badan Anggaran itu ada 98 anggotanya. Kita rapat itu sampai enam-delapan bulan, dari Maret hingga Oktober, bayangkan. Kalau orang anggota Badan Anggaran sebut nama ketua Badan Anggaran itu biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa," paparnya.

Ia juga mengaku tidak tahu menahu soal dugaan aliran dana korupsi proyek Bakamla masuk pembiayaan Munaslub Partai Golkar pada 2016 lalu. Orang yang disebut dekat dengan Setya Novanto itu justru merumut antara Munaslub Golkar dengan pembahasan Bakamla.

"Munaslub Golkar kapan, coba dilihat kapan. Lihat tanggalnya dulu. Pembahasannya anggaran kapan. Jadi jangan begitu. Itu namanya cenderung tidak betul," ujar Wakil Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar itu.

Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Golkar Melchias Markus Mekeng menilai ada pihak-pihak yang sedang mencatut nama besar Golkar di proyek Bakamla. "Kalau yang namanya uang partai itu adalah uang yang masuk ke dalam rekening partai. Jadi kalau uang tidak masuk rekening partai itu hanya orang jual nama," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (25/1).

Oleh sebab itu, sangat mungkin dengan apa yang dilakukan oleh koleganya Fayakhun Andriadi bisa jadi hanya menjual Partai Golkar, demi kepentingan pribadinya. "Jadi itu orang jual nama saja," tukasnya.

Ketua DPR RI sekaligus mantan Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, kasus tersebut jangan dikaitkan dengan Golkar. "Jangan dikaitkan dengan Golkar dong. Kasihan Golkar, buktinya mana? Kan cuma keterangan, mana tahu dia cuma ngaku-ngaku Golkar," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, (25/1).

Dia membantah apabila uang suap Bakamla ada yang masuk ke Partai Golkar untuk peny-

elenggaraan Munaslub Bali pada 2016. Ketika penyelenggaraan munaslub dirinya bukan menjabat sebagai bendahara. "Oh nggak ada. Fayakhun itu kan tidak masuk dalam struktur dan masuk dalam kelompoknya Pak Novanto kalau nggak salah. Saya kan Akom (Kubu Ade Komaruddin, Red)," kilahnya.

Bamsoet mengaku tidak pernah berhubungan dengan Fayakhun di Partai Golkar, apalagi membahas aliran uang. Terkait dugaan suap tersebut, Bamsoet menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung ke Fayakhun. "Jadi gini yang terkait dengan Golkar dan ada kesaksian di mana di persidangan, kawan-kawan mencari informasi terhadap pihak-pihak yang disebutkan kalau ada yang menyebut nama Golkar," pungkasnya.

Sebelumnya, terkuak adanya aliran dana korupsi Bakamla yang digunakan untuk kegiatan partai termasuk Munaslub Golkar di Bali pada 2016. Ini berdasarkan keterangan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arif selaku saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan alat satelit monitoring dan drone di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1) lalu.

Adapun Erwin merupakan vendor yang digunakan PT Melati Techno Indonesia, selaku pemenang lelang proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Menurut keterangan Erwin Arif, ada USD 300 ribu dari proyek "satellite monitoring" di Bakamla untuk Munaslub Partai Golkar. Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sempat mendeskannya untuk mengirimkan uang tersebut.

Semula, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan antara Fayakhun dengan Erwin melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp tertanggal 4 Mei 2017. Dalam percakapan itu, Fayakhun meminta Erwin untuk memberitahu pihak PT Melati Techno, agar lebih dulu membayar USD 300 ribu secara tunai. "Bro, kalau dikirim Senin, maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal, Jumat depan sudah munas Golkar," demikian bunyi pesan singkat itu. (aen)